

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good governance atau juga disebut pemerintahan yang baik umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum atau norma yang berlaku dalam negara tersebut. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN (korupsi, kolusi & nepotisme). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih tersebut, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif di dalam kinerjanya serta memiliki prinsip-prinsip yang transparan dan akuntabel atau bertanggung jawab didalam sistem pemerintahannya.

Mardiasmo, Barnes & Sakurai (2008) menyebutkan, Indonesia adalah contoh utama ekonomi dimana kesadaran akan manfaat tata kelola telah meningkat secara dramatis sejak krisis keuangan Asia 1997. Sebagai bagian dari pemulihan fase, pascakrisis, Indonesia telah berupaya meningkatkan ketahanan terhadap krisis dan keruntuhan dengan meningkatkan penerapan tata kelola melalui berbagai kebijakan inovatif baik sektor swasta maupun pemerintah. Kebijakan transisi ekonomi Indonesia pada tahun 1999 adalah pengenalan desentralisasi, memungkinkan otonomi pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya dan alokasi sumber daya. Kebijakan desentralisasi, Di Indonesia seperti yang telah diterapkan dalam

beberapa tahun terakhir telah berdampak kuat pada tingkat pemerintahan regional. Sebuah pemeriksaan bagaimana kebijakan desentralisasi telah mempengaruhi implementasi *good governance* di daerah tingkat pemerintahan tepat waktu.

Dengan adanya globalisasi, perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin berkembang pesat ditandai dengan adanya perubahan reformasi yakni melakukan pergeseran sistem dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yang semula berwujud sentralisasi menjadi desentralisasi yang memfokuskan pada pemerintah daerah. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang merupakan acuan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama untuk menjalankan *good governance* yang dituntut untuk memberikan pertanggung jawaban yang lebih akurat. Pelayanan publik merupakan salah satu pilihan strategis untuk implementasi *good governance* dengan melalui organisasi pelayanan publik. (Regita & Sutjipto ,2019)

Akuntansi mempunyai arti yang luas, dalam hal ini akuntansi adalah sistem informasi yang membantu menjalankan tugas dari suatu organisasi agar tujuan dari organisasi tersebut dapat dicapai. Dalam organisasi sektor publik peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* sangatlah penting, antara lain untuk mendukung terciptanya akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, efisiensi dan efektivitas, dan visi yang strategis. Akuntansi saat ini bukan hanya sekedar alat untuk mencatat

suatu kejadian ekonomi, akan tetapi akuntansi memiliki arti dan mempunyai suatu tujuan dalam setiap prosesnya. Dalam setiap entitas ekonomi, baik sektor publik maupun sektor swasta akuntansi mempunyai kontribusi dalam hal pengolahan sumber daya yang ada dalam entitas tersebut. (Ashari & Riharjo, 2019)

Paradigma yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah telah mengalami pergeseran dari paradigma “*rule government*” menjadi “*good governance*”. Pemerintah dalam penyelenggaraan paradigma “*rule government*” di dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik senantiasa lebih melibatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan paradigma “*good governance*” dalam penyelenggaraan pemerintah tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah atau negara saja, akan tetapi dengan melibatkan sebuah elemen, baik di dalam birokrasi maupun di luar birokrasi publik (masyarakat). Sejalan dengan berjalannya otonomi daerah, diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem yang ada secara transparan, akuntabilitas efektifitas dan efisiensi kerja.

Hal tersebut tidak lepas dari penerapan *good governance* yang tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Dimana di dalam pemerintahan kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur

urusan kepemimpinan dan perekonomian di daerah. Sehingga pemerintah kabupaten/kota berlomba-lomba untuk memanfaatkan potensi daerah masing-masing demi mendongkrak dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) begitupun dengan pengembangan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, masyarakat mengeluhkan pelayanan publik yang kurang baik dan maksimal serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang seharusnya sudah wajib diterapkan dalam pemberian pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksanakan. Hal ini dapat dilihat saat penulis melakukan pengamatan, contohnya: adanya pegawai yang kurang disiplin dan patuh terhadap peraturan yang ditetapkan seperti datang terlambat saat masuk kantor dan keluar tanpa izin pada saat jam kerja. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang supaya masyarakat dapat mengetahui bagaimana sistem tata kelola keungan dan kinerja pelayanan publik yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Karena dalam praktik akuntansi transparansi dan akuntabilitas dipemerintahan merupakan hal yang sangat sensitif oleh karena itu sangat jarang menjadi perhatian khusus dalam praktik maupun kajian ilmiah. Tata kelola yang baik akan berpengaruh baik juga terhadap pelaporan yang dibuat oleh suatu entitas begitupun sebaliknya tata kelola yang buruk maka berpengaruh buruk juga terhadap entitas tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan diatas, Penelitian yang akan saya bahas memfokuskan pada bagaimana

terselenggaranya sebuah sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) yang merupakan visi dan misi bagi setiap bangsa. Konsep “*government*” menunjukkan pada suatu organisasi dalam pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi yaitu dalam negara dan pemerintahan. Konsep dari “*government*” sendiri tidak sekedar melibatkan pemerintah dan negara saja namun juga sebagai peran dalam berbagai sektor baik di luar pemerintahan maupun di luar negara, sehingga melibatkan pihak-pihak yang sangat luas. maka saya selaku penulis berniat untuk melaksanakan penelitian tersebut. Supaya dapat diketahui bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Sehingga hal tersebut menjadi dasar penulis dalam memuat judul

“Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Jombang”

1.2 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam sistem dan kinerja sektor pelayanan publik di Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Jombang. Dengan memfokuskan pada sembilan prinsip yang telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada dan berjalan dengan lancar atau masih menemui

kendala-kendala yang mengganggu dalam implementasi *good governance* di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dirangkum dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang ada pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Jombang ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan cara mengatasinya pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Jombang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip *good governance* dan cara mengatasinya pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang saya lakukan antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya dan memperdalam banyak ilmu yaitu ilmu akuntansi, sosial dan politik terutama mengenai konsep pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintahan Kabupaten Jombang agar lebih memaksimalkan dalam menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip *good governance* dalam berbagai sektor di Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Jombang.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengertian dan prinsip *good governance*.